



**LAPORAN**  
**KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR RI**  
**KE KABUPATEN BADUNG PADA RESES MASA PERSIDANGAN IV**  
**TAHUN SIDANG 2023-2024**  
**TANGGAL 9-13 MEI 2024**

**I. PENDAHULUAN**

**I.1 Latar Belakang**

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, yang merupakan salah satu fungsi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR RI selalu memantau dan mengawasi berbagai kebijakan dan program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah.

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf f Peraturan Tata Tertib DPR RI menyatakan bahwa salah satu kegiatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan DPR RI adalah melalui kunjungan kerja. Sedangkan di dalam Pasal 60 ayat (3) huruf f juga menyebutkan bahwa Komisi dapat mengadakan kunjungan kerja di masa reses yang hasilnya akan dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditindaklanjuti. Untuk itu, Komisi IX DPR-RI dalam Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 memutuskan untuk melakukan kunjungan kerja secara paralel ke 3 (tiga) daerah di Provinsi Bali, yaitu Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Tabanan.

Dalam pelaksanaan kunjungan kerja, Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan serta pengawasan obat dan makanan, mengharapkan mendapatkan masukan secara langsung baik dari Pemerintah Daerah, mitra kerja, maupun masyarakat umum tentang realisasi program dan anggaran yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat/APBN dan juga untuk memonitor pelaksanaan program-program instansi/badan mitra kerja Komisi IX DPR RI di daerah tujuan kunjungan kerja. Selain itu, kunjungan kerja juga bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait perumusan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi IX DPR RI.

## **I.2 Dasar Kegiatan**

- a. Keputusan Pimpinan DPR-RI tentang Penugasan kepada Anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI untuk melakukan kunjungan kerja berkelompok dalam Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024.
- b. Keputusan Rapat Internal Komisi IX DPR RI tanggal 5 Maret 2024 pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023 - 2024.

## **I.3 Maksud dan Tujuan**

- a. Menjalankan fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam lingkup tugas Komisi IX DPR RI.
- b. Mendapatkan informasi realisasi program dan anggaran yang dibiayai APBN.
- c. Memetakan permasalahan masyarakat dan memonitor pelaksanaan program-program instansi/badan mitra kerja Komisi IX DPR RI di Kabupaten Badung.
- d. Menyerap aspirasi masyarakat Kabupaten Badung secara umum terkait proses legislasi dan perumusan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi IX DPR RI.

#### I.4 Peserta

Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Kabupaten Badung dipimpin oleh Ketua Komisi IX DPR RI Ibu **Felly Estelita Runtuwene, SE** Adapun susunan lengkap anggota rombongan Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI sebagaimana berikut:

NO.	NO ANGG	NAMA	JABATAN	FRAKSI	DAPIIL
1.			Ketua Tim/Ketua Komisi IX DPR RI		
2.	A-182	Dr. H. EDY WURYANTO, S.KP., M.Kep	Anggota	PDIP	JATENG III
3.	A-212	KRIS DAYANTI	Anggota	PDIP	JATIM V
4.	A-222	H. ABIDIN FIKRI, S.H., M.H	Anggota	PDIP	JATIM IX
5.	A-271	Drs. H. DARUL SISKKA	Anggota	GOLKAR	SUMBAR I
6.	A-291	Hj. DEWI ASMARA, SH, MH.	Anggota	GOLKAR	JABAR IV
7.	A-320	M. YAHYA ZAINI, SH	Anggota	GOLKAR	JATIM VIII
8.	A-66	dr. H. SUIR SYAM, M.Kes, MMR	Anggota	GERINDRA	SUMBAR I
9.	A-134	Dra. Hj. RUSKATI ALI BAAL	Anggota	GERINDRA	SULBAR
10.	A-357	IRMA SURYANI, S.E., M.M	Anggota	NASDEM	SUMSEL II
11.	A-5	H. HANDAYANI, SKM., MPH	Anggota	PKB	JAMBI
12.	A-32	Dr. Hj. ARZETI BILBINA, M.A.P	Anggota	PKB	JATIM I

13.	A-545	LINDA MEGAWATI, SE., M.Si	Anggota	DEMOKRAT	JABAR IX
14.	A-553	Dra. LUCY KURNIASARI	Anggota	DEMOKRAT	JATIM I
15.	A-571	Hj. ALIYAH MUSTIKA ILHAM, SE	Anggota	DEMOKRAT	SULSEL I
16.	A-414	H. ANSORY SIREGAR, Lc.	Anggota	PKS	SUMUT III
17.	A-480	Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag, M.Hum, MA	Anggota	PAN	SUMUT II
18.	A-494	DIAN ISTIQOMAH, S.Kep	Anggota	PAN	DKI JKT III
19.	A-465	Hj. NURHAYATI	Anggota	PPP	JABAR XI

### **I.5 Kegiatan Kunjungan Kerja**

Dalam kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Kabupaten Badung, akan dilakukan pertemuan dengan Bupati Badung, dan instansi terkait bidang kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan, pengawasan obat dan makanan, dan jaminan sosial yaitu:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung;
2. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung;
3. Kepala Perwakilan BKKBN Kabupaten Badung;
4. UPT BP3MI Bali;
5. Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Banuspa;
6. Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Badung;
7. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Badung;
8. BBPOM di Denpasar
9. Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Badung;
10. Direktur RSD Mangusada Kab. Badung;

Didampingi oleh :

- a. Kementerian Kesehatan RI;
- b. Kementerian Ketenagakerjaan RI;
- c. Badan POM RI;
- d. BKKBN RI;
- e. BP2MI RI;
- f. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN);
- g. Direksi dan Dewas BPJS Kesehatan; dan
- h. Direksi dan Dewas BPJS Ketenagakerjaan.

## **II. GAMBARAN UMUM DAERAH**

### **II.1 Gambaran Umum**

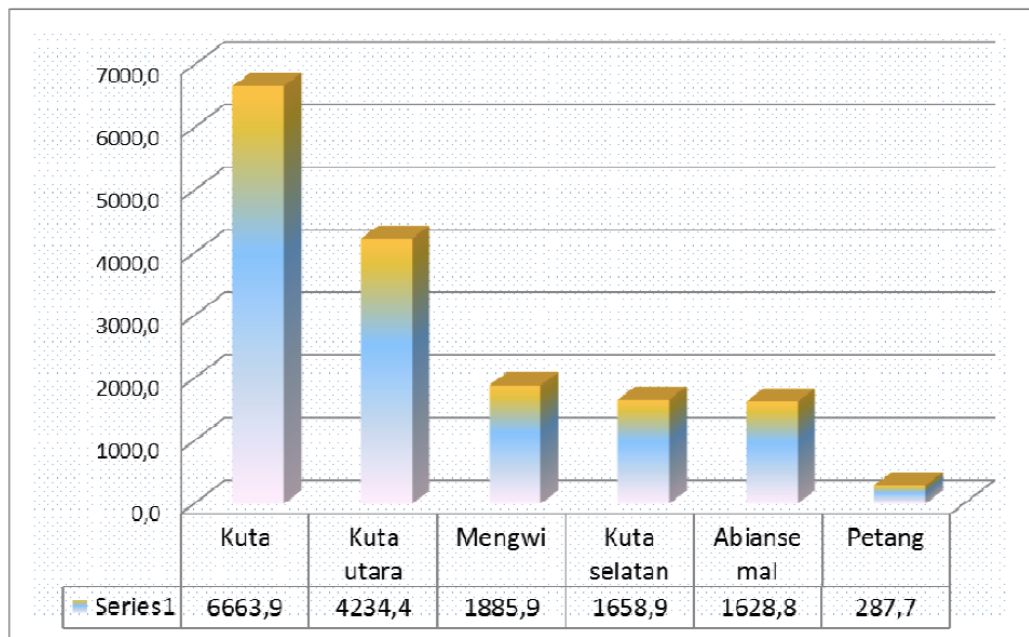
Kabupaten Badung merupakan salah satu dari 9 kabupaten/kota yang terdapat di Propinsi Bali dan terletak ditengah-tengah pulau Bali membujur dari utara sampai ujung selatan. Pada bagian utara berbatasan dengan kabupaten Buleleng, bagian barat berbatasan dengan kabupaten Tabanan, Sedangkan pada bagian timur berbatasan dengan kabupaten Bangli, Gianyar serta kotamadya Denpasar.

Kabupaten Badung memiliki luas wilayah 418,52 Km<sup>2</sup> yang meliputi 6 kecamatan, yaitu kecamatan Petang, Abiansemal, Mengwi, Kuta, Kuta Utara dan Kuta Selatan yang terdiri dari 16 Kelurahan, 45 Desa, 357 Banjar Dinas, 4 Banjar Dinas Persiapan, 147 Lingkungan, 1 Lingkungan Persiapan, 119 Desa Adat, 523 Banjar Adat dan 523 Sekaa Teruna.

### **II.2 Jumlah Penduduk**

Sebelum Tahun 1992 wilayah Kabupaten Badung mencakup keseluruhan wilayah Kota Denpasar, yang meliputi Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar Timur dan Denpasar Barat. Namun, dengan adanya perubahan status pemerintahan menjadi Kota Administrasi Denpasar pada bulan Pebruari 1992, maka sejak itu pula Kabupaten Badung hanya mencakup Kecamatan

Kuta (yang sekarang dimekarkan menjadi 3 kecamatan yakni Kecamatan Kuta Utara, Kuta dan Kuta Selatan), Mengwi, Abiansemal dan Petang. Sedangkan luas wilayah Kabupaten Badung juga mengalami pengurangan dari semula 520,73 km<sup>2</sup> menjadi 418,52 km<sup>2</sup>. (Data perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah Kabupaten Badung, 2005). Untuk mengetahui jumlah penduduk, selama ini masih bertumpu pada hasil sensus penduduk dan hasil survey kependudukan. Berikut data kepadatan penduduk di Kabupaten Badung dari Tahun 2022.



Sumber : profil Kesehatan kabupaten badung

Berdasarkan grafik diatas wilayah yang paling padat penduduk adalah Kecamatan Kuta.

### II.3 Gambaran Umum Kesehatan Kabupaten Badung

Dalam rangka meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sampai dengan tahun 2022 di Kabupaten Badung telah dibangun 13 unit Puskesmas induk yang telah memiliki kemampuan gawat darurat serta kemampuan laboratorium. Jumlah puskesmas pembantu di Kabupaten Badung tahun 2022 sebanyak 55 unit. Kabupaten Badung memiliki 3

puskesmas dengan fasilitas rawat inap yaitu Puskesmas Abiansemal I, Puskesmas Mengwi I dan Puskesmas Kuta I. Puskesmas non rawat inap sebanyak 10 Puskesmas yaitu Puskesmas Petang I-II, Puskesmas Mengwi II-III, Puskesmas Abiansemal II-IV, Puskesmas Kuta II, Puskesmas Kuta Utara dan Puskesmas Kuta Selatan.

Rumah sakit yang ada di Kabupaten Badung tahun 2022 terdiri dari 1 unit rumah sakit pemerintah (RSUD Mangusada), 1 unit rumah sakit milik kementerian kesehatan (kemenkes) dan 8 unit rumah sakit swasta dimana 2 unit termasuk Rumah Sakit Tipe B yaitu RSUD Siloam dan RSK Bedah BIMC Nusa Dua dan sisanya termasuk dalam Rumah Sakit Tipe C.

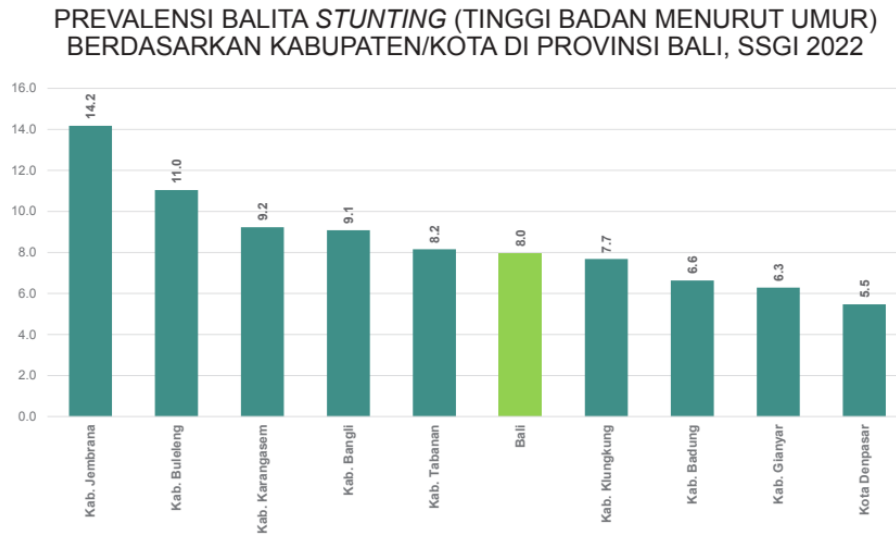
### Indikator Derajat Kesehatan

Indikator derajat kesehatan masyarakat, tercermin dalam kondisi angka kematian, angka kesakitan dan status gizi. Semakin rendahnya Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI) dan status gizi buruk masyarakat, maka semakin tinggi derajat kesehatan masyarakat. Berikut adalah Indikator Kesehatan di Kabupaten Badung. Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita berturut-turut di tahun 2023 adalah 52.88, 3.65 dan 5.39.

Indikator Kesehatan <i>Health Indicators</i>	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angka Kematian Kasar (Per Seribu Penduduk) / <i>Crude Death Rate</i>	2,71	2,73	4,30	5,76	4,2
Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100 Ribu Kelahiran Hidup) / <i>Maternal Mortality Rate</i>	28,16	114,45	205,36	36,58	52,88
Angka Kematian Bayi (Per 100 Ribu Kelahiran Hidup) / <i>Infant Mortality Rate</i>	2,70	2,29	3,13	5,12	4,65
Angka Kematian Balita (Per 1.000 Balita) / <i>Under Five Mortality Rate</i>	0,40	2,77	3,46	5,49	5,39

## Prevelensi Stunting

Prevelensi stunting di Kabupaten Badung dari tahun 2021 ada di besaran 8,7% dan di tahun 2022 menurun menjadi 6,6%. Situasi dan kondisi stunting di Kabupaten Badung tahun 2023 per Agustus sebanyak 345 balita dari jumlah yang di timbang kurang lebih 15.700.



## II.4 Gambaran Umum Ketenagakerjaan Kabupaten Badung

Karakteristik penduduk yang bekerja merupakan kegiatan seseorang untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan, keuntungan, maupun upah/gaji yang dilakukan paling sedikit satu jam dalam seminggu terakhir. Penduduk bekerja merupakan cerminan angkatan kerja yang terserap di pasar kerja. Keadaan lapangan kerja di Kabupaten Badung menurut kegiatan selama seminggu melalui Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 451.921 yang terdiri dari 225.183 laki-laki dan 226.738 perempuan yang merupakan gabungan dari Angkatan Kerja sebesar 333.483 terdiri atas yang bekerja sebesar 324.403 orang dan pengangguran terbuka sebesar 9.080 orang. Bukan Angkatan Kerja sebesar 118.438 orang terdiri atas 41.831 laki-laki dan 76.607 perempuan.

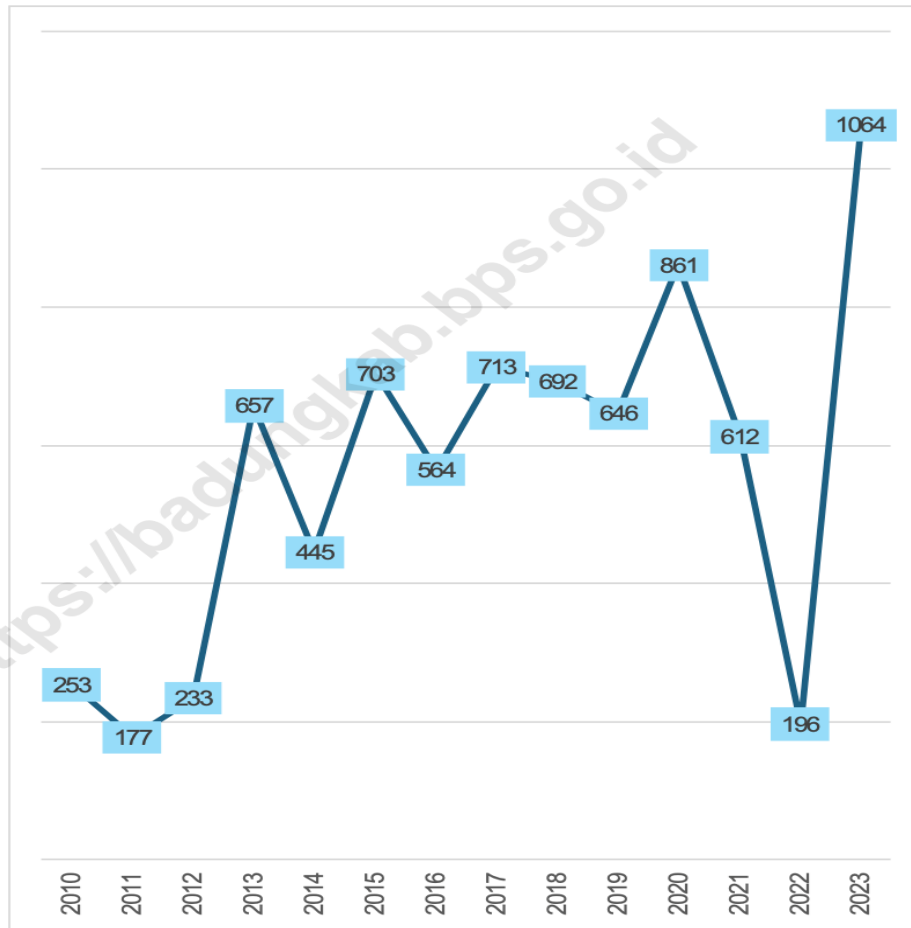


Kegiatan Utama <i>Main Activity</i>	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Laki-Laki+ Perempuan <i>Male+Female</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I. Angkatan Kerja/<i>Economically Active</i></b>	<b>183.352</b>	<b>150.131</b>	<b>333.483</b>
1. Bekerja/ <i>Working</i>	177.810	146.593	324.403
2. Pengangguran Terbuka/ <i>Unemployment</i>	5.542	3.538	9.080
<b>II. Bukan Angkatan Kerja/<i>Not Economically Active</i></b>	<b>41.831</b>	<b>76.607</b>	<b>118.438</b>
1. Sekolah/ <i>Attending School</i>	20.096	15.998	36.094
2. Mengurus Rumah Tangga/ <i>Housekeeping</i>	10.163	53.343	63.506
3. Lainnya/ <i>Others</i>	11.572	7.266	18.838
<b>Jumlah/<i>Total</i></b>	<b>225.183</b>	<b>226.738</b>	<b>451.921</b>
<b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)</b> <i>Labor Force Participation Rate (%)</i>	<b>81,42</b>	<b>66,21</b>	<b>73,79</b>
<b>Tingkat Pengangguran Terbuka (%)</b> <i>Open Unemployment Rate (%)</i>	<b>3,02</b>	<b>2,36</b>	<b>2,72</b>

Selanjutnya, akan dilihat karakteristik penduduk bekerja berdasarkan lapangan pekerjaan utama, status pekerjaan utama, dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan jenis kegiatan selama seminggu adalah Angkatan Kerja sebesar 33.483 orang dengan jumlah yang bekerja sebanyak 324.403 orang dan pengangguran sejumlah 9.080 orang dengan prosentase perbandingan sebanyak 97,28 persen

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan <sup>1</sup> <i>Educational Attainment<sup>1</sup></i>	Angkatan Kerja/ <i>Economically Active</i>			Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja <i>Percentage of Working to Economically Active</i>
	Bekerja <i>Working</i>	Pengangguran <sup>2</sup> <i>Unemployment<sup>2</sup></i>	Jumlah Angkatan Kerja <i>Total of Economically Active</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0	55.822	1.008	56.830	98,23
1	37.259	296	37.555	99,21
2	140.109	4.606	144.715	96,82
3	91.213	3.170	94.383	96,64
<b>Jumlah/Total</b>	<b>324.403</b>	<b>9.080</b>	<b>333.483</b>	<b>97,28</b>

Jumlah Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Badung meningkat drastis di tahun 2023 sebanyak 1064 tenaga kerja yang semula hanya 196 tenaga kerja di tahun 2022.



Sumber/Source : Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja Kabupaten Badung/ Agency of Industry and Employment of Badung Regency

### III. HASIL KUNJUNGAN KERJA

#### BIDANG KESEHATAN

##### A. DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG

URAIAN		Anggaran	
		2023	2024
INDUK	DINKES	548.429.194.520	550.666.817.523
	RSDM	326.299.965.063	394.651.055.547
	PUSK	21.522.102.967	26.203.514.254
	<b>TOTAL KES.</b>	<b>896.251.262.550</b>	<b>971.521.387.324</b>
PERUBAHAN	DINKES	575.877.729.767	
	RSDM	371.820.736.523	
	PUSK	21.522.102.967	
	<b>TOTAL KES.</b>	<b>969.220.569.257</b>	<b>971.521.387.324</b>

Program prioritas dinkes mengacu ke Renstra 2021-2025

- a) Peningkatan Akses dan kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan serta Pembiayaan
- b) Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi yang berbasis IT
- c) Pemulihan kondisi kesehatan pasca pandemi (Covid-19) dalam kehidupan tatanan baru (new normal)
- d) Penurunan Stunting melalui program Gerakan Badung Sehat 1000 Hari Kehidupan (Garbasari)
- e) Penanggulangan Penyakit Menular dan tidak menular (PTM) melalui vaksinasi ca. cerviks dan pemeriksaan ABVS.
- f) Optimalisasi pelayanan dasar dan rujukan melalui pelayanan ambulanCE desa.

Berdasarkan peta permasalahan adapun masalah yang dihadapi adalah:

- a. Belum tercapainya target 100% SPM yaitu dapat dilihat pada tabel berikut :
- b. Belum adanya sistem digital dan terintegrasi Dinkes Badung
- c. Beberapa penyakit dan layanan kesehatan belum tercover BPJS Kesehatan
- d. Masih terjadinya stunting di Kabuapten Badung

Upaya yang dilakukan adalah membuat inovasi berkesinambungan yang terintegrasi dengan prinsip kolaboratif, efisien dan efektif, inovatif, spirit, komitmen, up to date, connecting, dan adaptif seperti Garbasari, KBS, Ambulan Desa, Layanan Mawas, Gerakan Badung Sehat, SIM-Dinkes

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Di Kab.Badung Tahun 2023  
Regulasi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Tentang Kesehatan
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2015, Tentang Penanggulangan Kanker Payudara dan Leher Rahim
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022, perubahan atas PMK 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024
6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2013, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017, Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Strategi :

Langkah - Langkah kebijakan dan strategi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dalam mencapai target indikator adalah :

1. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat sehingga dapat terhindar dari faktor risiko.
2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui penguatan sumber daya , dan standardisasi pelayanan,
3. Meningkatkan kemitraan dengan lintas program, lintas sektor, dan pemangku kepentingan terkait,
4. Menyelenggarakan Surveilans dengan mengintegrasikan dalam sistem surveilans penyakit tidak menular di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan masyarakat.
5. Meningkatkan advokasi kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan pemangku kepentingan terkait.

Kegiatan :

1. Promotif  
Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan GERMAS
2. Preventif  
Deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular (TB,BB,IMT,Lingkar Perut,GDS,AU,Kolesterol, Skrining kanker payudara dan serviks, Indera, Tensi )
3. Kuratif  
Tata laksana dini kasus baru dengan pemberian obat maupun pemantauan yang terus menerus
4. Rehabilitatif  
Kunjungan rumah untuk mencegah penderita PTM jatuh kedalam keadaan yang lebih parah

Capaian Program :

NO	INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN	KET
1	Pelayanan kesehatan penduduk usia produktif	100%	100%	
2	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100%	99,84%	
3	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	100%	99,70%	
4	Jumlah WUS yang melakukan deteksi dini kanker payudara dan serviks	80%	42,55%	
5	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan posbindu PTM	100%	100%	
6	Jumlah deteksi dini indera	100%	86,60%	

## B. Penanganan Penyakit Menular Tahun 2023

Kegiatan :

1. Penguatan manajemen vektor yang efektif, aman, dan berkesinambungan
2. Peningkatan pelibatan masyarakat yang berkesinambungan
3. Pengembangan kajian, invensi, inovasi, dan riset sebagai dasar kebijakan dan manajemen program berbasis bukti
4. Penguatan surveilans penyakit menular yang komprehensif serta manajemen KLB yang responsif
5. Penguatan Puskesmas sebagai Rabies Centre (RC) dengan preventif, promotive dan tatalaksana kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) untuk mencegah kematian akibat Lyssa
6. Penguatan surveilans berbasis Masyarakat (SBM)
7. Penguatan koordinasi lintas sektor, lintas program dan jejaring eksternal maupun internal layanan di Fasyankes.
8. Penguatan Puskesmas dalam pencegahan, penemuan dan penatalaksanaan terhadap penyakit menular langsung.
9. Manajemen logistik yang baik, tepat dan akurat dengan menambahkan buffer stok untuk meminimalisir kekurangan stok
10. Penyediaan logistik yang sesuai dengan kebutuhan program, koordinasi juga dengan provinsi terkait ketersediaan logistik yang di distribusikan ke kabupaten.
11. Melakukan skrining TBC pada populasi berisiko pada Lapas/Rutan dengan metode *X-Ray*
12. Melaksanakan bimbingan teknis kepada fasyankes swasta yang belum berjejaring (*un-engaged*) dalam layanan TBC maupun yang sudah berjejaring (*engaged*)
13. Pelibatan Universitas Udayana dalam skrining TBC melalui program TBC-*Warrior*
14. Mengoptimalkan peran petugas PPTI yang ada di masing-masing Puskesmas untuk melakukan penjarangan terduga TBC, pelacakan kasus mangkir, dan pendampingan pengobatan pada pasien TBC.
15. Melaksanakan Investigasi Kontak pada kontak erat dan kontak serumah dari kasus indeks TBC.
16. Puskesmas bersama komunitas melaksanakan *active case finding* (ACF) dan penyuluhan terkait TBC pada populasi berisiko tinggi terkena TBC.
17. Penambahan layanan PDP di Kabupaten Badung.
18. Skrining rutin HIV pada populasi kunci.

Upaya yang sudah dilakukan Pemerintah khususnya dan kebijakan yang dikeluarkan dalam mengatasi permasalahan Kesehatan yang ada saat ini :

- a Pada penyakit tidak menular, upaya preventif yang dilakukan adalah deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular (TB, BB, IMT, Lingkar Perut, GDS, AU, Kolesterol, Skrining kanker payudara dan serviks, Indera, Tensi ).

- b. Adapun Inovasi sebagai upaya preventif dan kebijakan yang dikeluarkan untuk mengatasi permasalahan kesehatan adalah sebagai berikut :
1. Untuk skrining kanker payudara dan serviks dinas kesehatan memiliki inovasi Layanan Mawas (Mobil Layanan Kesehatan Perempuan Mangupura Women Service) dengan sistem ABVS (Automated Breast Volume Scanner). Mobil bus ini khusus didesain untuk pemeriksaan sejak dini penyakit kanker payudara. Mobil deteksi dini kanker payudara ini merupakan yang pertama di Asia-Fasifik dan nomor 2 di dunia.
  2. novasi Garbasari (Gerakan Badung Sehat pada Seribu Hari Pertama Kehidupan) yang merupakan inovasi untuk percepatan penurunan stunting di Kabupaten Badung.
  3. Upaya preventif yang dilakukan melalui program Krama Badung Sehat yaitu dengan mendaftarkan seluruh penduduk kabupaten badung yang belum memiliki Jaminan Kesehatan sebagai peserta JKN yang di biayai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dengan tanggungan kelas III dan memberikan 13 layanan tambahan manfaat cakupan bagi seluruh penduduk Badung yang sudah ber-JKN.
  4. Upaya- upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Badung antara lain dengan membentuk Pelayanan Ambulance Desa yang dimasing-masing desa menyediakan 1 Ambulans dimana tenaganya ada di 62 Desa/Kelurahan se- Kabupaten Badung yang terdiri dari 2 orang Supir dan 4 orang tenaga paramedis.

Keadaan SDM Kesehatan di Kabupaten saat ini.

<b>NO</b>	<b>JENIS TENAGA</b>	<b>JUMLAH</b>
1	PNS	590
2	PPPK	676
3	Tenaga Kegiatan	1.201
<b>TOTAL TENAGA</b>		<b>2.467</b>
1	Kebutuhan CPNS 2024	495
2	Kebutuhan PPPK 2024	166
<b>TOTAL TENAGA</b>		<b>661</b>

Kendala yang dihadapi dalam mengatasi permasalahan Kesehatan selama ini :

belum adanya kajian/regulasi/kebijakan terkait kesempatan ikut serta seleksi PPPK tenaga CS, Satpam dan Sopir.

## **B. BKKBN PERWAKILAN BALI**

Beberapa permasalahan kependudukan di Kabupaten Badung Tahun 2022 dan 2023 antara lain sebagai berikut :

- a) Tingkat pengangguran terbuka adalah 2,72%,
- b) Kepadatan penduduk tinggi 1309,52 jiwa per km<sup>2</sup>,
- c) Migrasi Seumur hidup yang tinggi 17,60%,
- d) TFR ditahun 2022 yang terus menurun mencapai 1,89 yaitu dibawah kondisi ideal 2.1,
- e) Indeks Pembangunan Keluarga yang masih Rendah 58,99.

Selain tantangan besar kependudukan yang dimiliki Badung dalam upaya optimalisasi Bonus demografi menuju Indonesia emas 2045 adalah belum optimalnya upaya upaya implementasi pemanfaatan bonus demografi, meliputi kualitas SDM yg relatif masih rendah, kualitas kesempatan kerja yang perlu ditingkatkan, tingkat pengangguran masih relatif tinggi dan produktivitas kerja yang perlu ditingkatkan.

### ***Alokasi dan penyerapan APBN Perwakilan BKKBN Provinsi Bali Tahun 2022 - 2024 :***

Di Tahun 2022, total pagu awal Perwakilan BKKBN Provinsi Bali adalah sejumlah Rp. 65.304.692.000. Dalam perjalanan pelaksanaan anggaran di tahun 2022 terdapat beberapa perubahan pagu yang disebabkan karena adanya perubahan kebijakan pelaksanaan kegiatan-kegiatan strategis dan Refocusing anggaran, sehingga pagu akhir di tahun 2022 menjadi sebesar Rp. 64.335.459.000 dan di akhir tahun 2022 sudah terealisasi sebesar Rp. 61.964.871.576 atau sebesar 96.32% dari total pagu di Bulan Desember 2022.

Secara rinci, jumlah pagu, perubahan dan realisasi di masing-masing kegiatan pada Perwakilan BKKBN Provinsi Bali Tahun 2022 dapat disajikan dalam tabel dibawah :



2022	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	% Realisasi
Program Bangga Kencana	21.647.279.000	20.514.025.000	20.127.859.030	98,12
Dukungan Manajemen	43.657.413.000	43.821.434.000	41.837.012.546	95,47
	65.304.692.000	64.335.459.000	61.964.871.576	96,32

Di Tahun 2023, total pagu awal Perwakilan BKKBN Provinsi Bali adalah sejumlah Rp. 70.003.173.000. Terdapat kenaikan anggaran jika dibandingkan dengan pagu Tahun 2022. Dalam perjalanan pelaksanaan anggaran di tahun 2023 terdapat beberapa perubahan pagu yang disebabkan karena adanya perubahan kebijakan pelaksanaan kegiatan - kegiatan strategis dan Refocusing anggaran, sehingga pagu akhir di tahun 2023 menjadi sebesar Rp. 68.678.671.000 dan di akhir tahun 2023 sudah terealisasi sebesar Rp.68.306.365.078 atau sebesar 99.46% dari total pagu di Bulan Desember 2023. Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran di tahun 2022, sudah terdapat peningkatan realisasi sebesar **3.14%**.

Pada Anggaran 2024, total pagu awal Perwakilan BKKBN Provinsi Bali adalah sejumlah Rp. 68.281.080.000. Terdapat penurunan anggaran jika dibandingkan dengan pagu Tahun 2023 sebesar Rp. 1.722.093.000. Sampai dengan Mei 2024, terdapat perubahan pagu belanja menjadi sebesar Rp. 69.676.174.000. Akan tetapi dari jumlah pagu tersebut, terdapat pagu blokir (automatic adjustment) sebesar Rp. 5.478.619.000. Sampai dengan 3 Mei 2024, sudah terdapat realisasi anggaran sebesar Rp.28.208.942.678 atau sebesar 43.94% dari total pagu di Bulan Mei 2024.

***Capaian Program Perwakilan BKKBN Provinsi Bali Tahun 2022 - 2023 :***

Di tahun 2022, dari 6 sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Bali Tahun 2020-2024, terdapat 4 indikator kinerja utama (IKU) sudah memiliki capaian kinerja dengan kategori **SANGAT BAIK ( $\leq 90$ )** yaitu Menurunnya angka kelahiran total (TFR) dengan target 2.10 dan capaian 2.07 (persentase capaian 97.10%), Menurunnya angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun dengan target 18 kelahiran per 1000 WUS usia 15 - 19 tahun dan capaian 17.7 kelahiran

(persentase capaian 101.69%), meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (IPBK) dengan target 59.30 dan capaian 58.97 (persentase capaian 99.44%), dan meningkatnya Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) dengan target 23 tahun dan capaian 22.57 tahun (persentase capaian 99.57%).

Sedangkan, berdasarkan Perjanjian Kinerja Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, rata-rata capaian kinerja Perwakilan BKKBN Provinsi Bali adalah sebesar 101.69%. di tahun 2023, dari 6 sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Bali Tahun 2020-2024, semua indikator kinerja utama (IKU) sudah memiliki capaian kinerja dengan kategori **SANGAT BAIK ( $\leq 90$ ) dengan rincian sebagai berikut :**

Di

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN DARI TARGET	INDIKATOR KEBERHASILAN
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	1,93 Rata-rata anak per Wanita	2.03	94.8	SANGAT BAIK
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR)	54,45%	59.65	109.6	SANGAT BAIK
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	17,43%	10.46	140.0	SANGAT BAIK
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	17 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	17.4	97.6	SANGAT BAIK
5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	61,38 (Skala 0-100)	64.96	105.8	SANGAT BAIK
6	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	23,2 Tahun	23	99.1	SANGAT BAIK

Tahun 2022, Kabupaten Badung mendapatkan alokasi DAK Fisik Sub Bidang KB sejumlah Rp. 207.000.000 dengan rincian pengadaan BKB KIT Stunting senilai Rp. 72.000.000 dan Pengadaan KIT Siap Nikah senilai Rp.135.000.000 di akhir tahun 2022, realisasi yang dicapai adalah sebesar 176.950.000 (85.48%). Sisa anggaran berupa sisa dari nilai kontrak pengadaan.

Sedangkan tahun 2023, Kabupaten Badung mendapatkan alokasi DAK Fisik Sub Bidang KB sejumlah Rp. 143.613.000 dengan rincian pengadaan Implant Removal KIT senilai Rp. 56.806.500 dan Pengadaan IUD KIT senilai Rp. 86.806.500. Di akhir tahun 2023, realisasi yang dicapai adalah sebesar 05.100.000 (73.18%). Sisa anggaran berupa sisa dari nilai kontrak pengadaan.

Di Tahun 2024, Kabupaten Badung mendapatkan alokasi DAK Fisik Sub Bidang KB sejumlah Rp. 200.000.000 berupa alokasi Rehab Balai Penyuluhan KB.

Selain DAK Fisik, terdapat pula alokasi anggaran Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB)/ DAK Non Fisik Sub Bidang KB. Ditahun 2022 terdapat total alokasi pagu BOKB sebesar Rp. 5.095.486.000 dengan total realisasi sebesar Rp. 2.186.765.668 (persentase realisasi 43%). Sedangkan di tahun 2023 terdapat alokasi BOKB sebesar Rp. 5.959.707.000 dengan total realisasi sebesar Rp. 4.361.131.320 (persentase realisasi 73.18%). Dan di Tahun 2024, alokasi BOKB Kabupaten Badung adalah sejumlah Rp. 4.483.337.000 dengan realisasi di bulan April 2024 sebesar Rp. 64.942.100 (persentase realisasi 1.45%).

## C. BPJS KESEHATAN

### 1. Cakupan Kepesertaan Tahun 2022 Dan 2023

#### a. Cakupan Kepesertaan JKN di Kabupaten Badung Tahun 2022

No	Segmen Kepesertaan	Jumlah Peserta			%	
		Aktif	Non Aktif	Jml	Aktif	Non Aktif
1	PBI APBD	225.444	15.468	240.912	93,58%	6,42%
2	PBI APBN	52.107	1.442	53.549	97,31%	2,69%
3	Bukan Pekerja	7.282	283	7.565	96,26%	3,74%
4	PBPU/BP	24.813	6.283	31.096	79,79%	20,21%
5	PPU BU	112.562	13.680	126.242	89,16%	10,84%
6	PPU PN	56.237	1.057	57.294	98,16%	1,84%
<b>Total Badung</b>		<b>478.445</b>	<b>38.213</b>	<b>516.658</b>	<b>92,60%</b>	<b>7,40%</b>

Berdasarkan tabel di atas cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Badung Tahun 2022 sebesar 516.658 jiwa dengan tiga cakupan kepesertaan terbesar pada segmen PBI APBD, PPU BU dan PPU PN. Tingkat keaktifan (all segmen peserta) sebesar 92,60%

#### b. Cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Badung Tahun 2023

No	Segmen Kepesertaan	Jumlah Peserta			%	
		Aktif	Non Aktif	Jml	Aktif	Non Aktif
1	PBI APBD	217.403	18.169	235.572	92,29%	7,71%
2	PBI APBN	53.276	3.799	57.075	93,34%	6,66%
3	Bukan Pekerja	12.088	414	12.502	96,69%	3,31%
4	PBPU/BP	29.347	6.040	35.387	82,93%	17,07%
5	PPU BU	124.225	13.267	137.492	90,35%	9,65%
6	PPU PN	54.958	1.168	56.126	97,92%	2,08%
<b>Total Badung</b>		<b>491.297</b>	<b>42.857</b>	<b>534.154</b>	<b>91,98%</b>	<b>8,02%</b>

Berdasarkan tabel di atas cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Badung Tahun 2023 sebesar 534.154 jiwa dengan tiga cakupan kepesertaan terbesar pada segmen PBI APBD, PPU BU dan PBI APBN. Tingkat keaktifan (all segmen peserta) sebesar 91,98%

## 2. Jumlah Fasilitas Kesehatan Yang Bekerjasama Dengan BPJS Kesehatan Hingga Saat Ini Dan Apakah Fasilitas Kesehatan Tersebut Sudah Mencukupi?

### a. Jumlah Faskes Kerjasama sampai dengan Maret 2024

No	Jenis FKTP	Jumlah
1	Puskesmas	13
2	Klinik TNI	1
3	Klinik Pratama	37
4	Klinik Polri	1
5	Tempat Praktik Mandiri Dokter (TPMD)	75
6	Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (TPMDG)	23
<b>Jumlah</b>		<b>150</b>
No	Jenis FKRTL	Jumlah
1	RS Pemerintah	2
2	RS TNI/Polri	0
3	RS Swasta	7
4	RS Khusus	0
5	Klinik Utama	1
6	Optik	2
7	Apotek PRB	6
<b>Jumlah</b>		<b>18</b>

### b. Ratio Dokter

No	Kab/Kota	Jumlah Dokter	Rasio Dokter/Peserta	Jumlah FKTP Rasio Dokter Peserta Terdaftar			
				≤ 5000	%	>5000	%
1	2	3	4	5	6	7	8=100%-kolom6
1	Kab. Badung	349	1.674,52	120	95,24%	6	4,76%

Ratio kecukupan dokter terhadap peserta sebesar 1 : 1.674 telah memenuhi standar ratio kebutuhan dokter yang ditetapkan Kementerian Kesehatan yaitu 1 : 5000 penduduk.

### c. Ratio Kecukupan Tempat Tidur

No	Kota/Kab	KELAS I		KELAS II		KELAS III	
		Rasio 1:1000	Keterangan	Rasio 1:1000	Keterangan	Rasio 1:1000	Keterangan
1	Kab Badung	1,8 : 1.000	relatif cukup	0,8 : 1.000	relatif kurang	1,0 : 1.000	relatif cukup

Ratio kecukupan tempat tidur relatif cukup untuk masing-masing kelas apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk dengan rasio 1 : 1000

**3. Hasil Pelaksanaan Program JKN Tahun 2022 dan 2023, termasuk klaim dari Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan? Hambatan apa yang dihadapi dan cara mengatasinya?**

**a. Biaya Pelayanan Kesehatan Tahun 2022 dan 2023**

NO	BIPELKES	2022	2023
<b>PELAYANAN KESEHATAN</b>			
1	RJTP	Rp 60.390.022.070	Rp 68.128.635.385
2	RITP	Rp 193.560.000	Rp 166.900.000
3	RJTL	Rp 128.540.000.484	Rp 174.564.684.543
4	RITL	Rp 203.328.305.182	Rp 290.314.196.992
<b>TOTAL BIPELKES</b>		<b>Rp 392.451.887.736</b>	<b>Rp 533.174.416.920</b>
5	PROMOTIF & PREVENTIF	Rp 59.128.000	Rp 333.834.000
<b>TOTAL</b>		<b>Rp 392.511.015.736</b>	<b>Rp 533.508.250.920</b>

Realisasi biaya pelayanan kesehatan di Kabupaten Badung Tahun 2022 sebesar Rp.392.511.015.736 dan Tahun 2023 Rp.533.508.250.920 yang terdiri dari biaya pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama, Rawat Inap Tingkat Pertama, Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, Rawat Inap Tingkat Lanjutan serta Program Promotif Preventif.

**b. Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan**

No.	Jenis Pemanfaatan	2020	2021	2022	2023	2024 (sd Pelayanan Feb 24)	% Naik/Turun Pemanfaatan Tahun 2021	% Naik/Turun Pemanfaatan Tahun 2022	% Naik/Turun Pemanfaatan Tahun 2023
1	Kasus Rawat Inap Rumah Sakit dan Klinik Utama (RITL)	20.468	19.439	29.867	43.434	7.170	-5%	54%	45%
2	Kasus Rawat Jalan Rumah Sakit dan Klinik Utama (RJTL)	266.947	305.856	412.032	562.506	102.683	15%	35%	37%
3	Kasus Rawat inap di FKTP (RITP)	2.612	1.405	741	368	52	-46%	-47%	-50%
4	Kunjungan di FKTP (RJTP)	1.670.701	1.753.460	2.004.607	1.967.477	312.864	5%	14%	-1,9%
Total Pemanfaatan/Tahun		1.960.728	2.080.160	2.447.247	2.573.785		6%	18%	5%
Total Pemanfaatan/Hari		5.372	5.699	6.705	7.051				

Terjadi kenaikan pemanfaatan pelayanan kesehatan JKN sebesar 6% di tahun 2021 dibandingkan tahun 2020, 18% pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 dan 5% pada tahun 2023 dibandingkan 2022

**c. Hambatan yang dihadapi :**

Masih rendahnya tingkat keaktifan peserta.

Upaya yang sudah dilakukan:

- Advokasi kepada peserta yang sudah pernah terdaftar sebelumnya dan non aktif agar menjadi aktif Kembali melalui telemarketing, telemarketing.
- Melakukan PESIAR yang bersinergi dengan desa di 3 wilayah desa uji coba pada Mei 2024
- Publikasi Program REHAB (Rencana Pembayaran Bertahap) yang dapat diakses melalui aplikasi Mobile JKN dan care center 165
- Melaksanakan BPJS Keliling
- Pengawasan dan pemeriksaan

## D. RSUD MANGUSADA BADUNG

### 1. Uraian Tempat Tidur dan Jumlah BOR RSD Mangusada

#### a. Uraian Jumlah Tempat Tidur

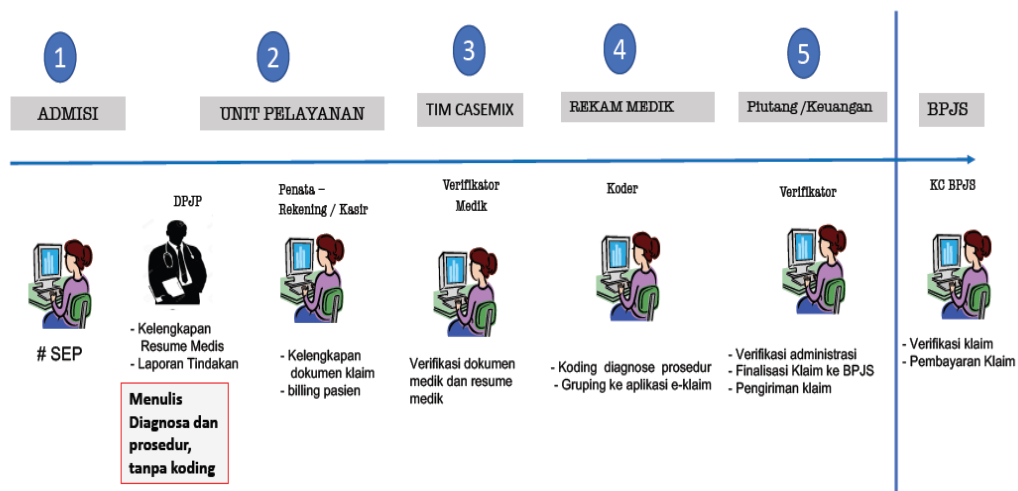
Kategori	Jumlah
Kelas I	39 TT
Kelas II	24 TT
Kelas III	105 TT
Iso Tekanan Negatif	4 TT
Non KIs	63 TT
Iso Tekanan Non Negatif	1 TT
VIP	32 TT
VVIP	5 TT
Super VIP	2 TT
Total	275 TT

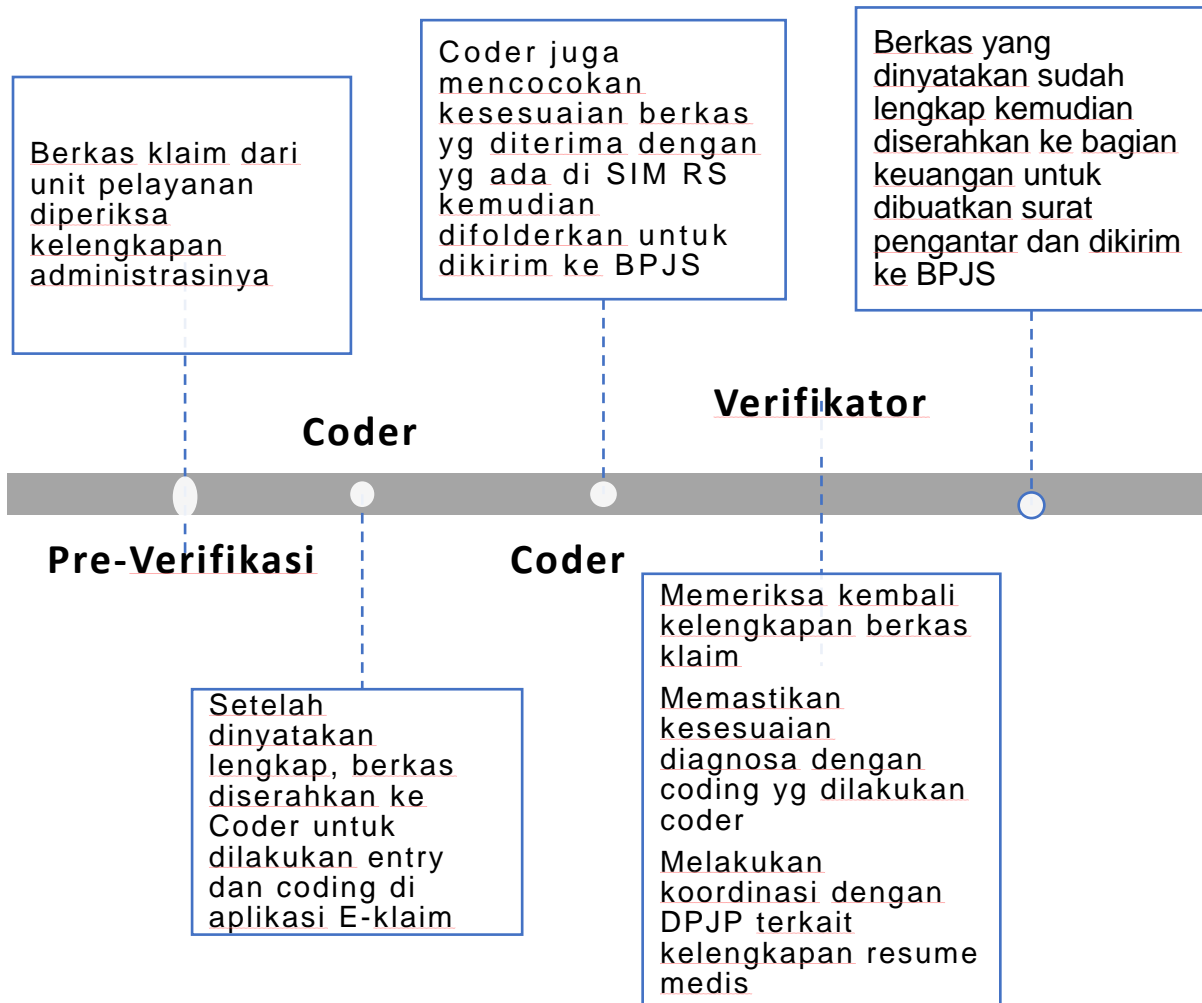
b. Jumlah BED Occupancy Rate ( BOR) RSD Mangusada Kabupaten Badung  
 Jumlah BOR pada saat ini di RSD mangusada adalah : 75.77%

### 2. Jumlah Tempat Tidur untuk KIs III JKN, dan Persentase dari total keseluruhan yang ada di RSD Mangusada Kabupaten Badung.

- Jumlah Tempat Tidur dari total keseluruhan adalah : 275 TT
- Jumlah Tempat Tidur untuk kelas III JKN yang dimiliki RSD Mangusada adalah : 105 TT
- Persentase dari total keseluruhan Tempat Tidur adalah : 38 %

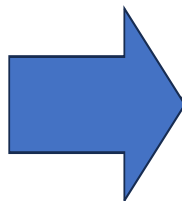
### 3. Proses Claim INA CBGs di RSD Mangusada Kabupaten Badung





### Pengajuan Klaim

- RS mengajukan klaim secara kolektif ke kantor cabang BPJS secara periodic dan lengkap setiap bulannya yang dilengkapi dengan dokumen pengajuan klaim
- Dalam satu bulan dapat mengajukan klaim regular dan klaim susulan antara tgl 1 – 15
- Pengajuan klaim regular minimal 75% dari jumlah SEP terbit



### Klaim diterima BPJS

- BPJS menerbitkan bukti penerimaan klaim saat RS menyerahkan klaim
- BPJS mengeluarkan berita acara kelengkapan berkas klaim paling lambat 10 hari kalender sejak klaim diterima
- BPJS melakukan verifikasi dan melakukan pembayaran berdasarkan hasil verifikasi paling lambat 15 hari sejak dikeluarkannya berita acara kelengkapan berkas klaim

**4. Jumlah SDM Kesehatan yang ada di RSD Mangusada, Tenaga Honorer dan Kebutuhan Tenaga Kesehatan**

a) Jumlah Pegawai di RSD Mangusada

SUMBER DAYA MANUSIA		STATUS KEPEGAWAIAN				JUMLAH
		PNS	PPPK	THL	KONTRAK	
I	TENAGA STRUKTURAL	13	-	-	-	13
II	TENAGA MEDIS					
	Dokter Sub Spesialis/Konsultan	12	1	-	-	13
	Dokter Spesialis	49	19	-	2	70
	Dokter Gigi Spesialis	2	-	-	-	2
	Dokter Umum	24	10	-	2	36
	Dokter Gigi	3	-	-	-	3
III	TENAGA PSIKOLOGI KLINIS	-	1	-	1	2
IV	TENAGA KEPERAWATAN	207	230	-	28	465
V	TENAGA KEBIDANAN	48	55	-	-	103
VI	TENAGA KEFARMASIAN					
	Apoteker	11	2	-	-	13
	Farmasi Klinik	1	-	-	-	1
	Asisten Apoteker	18	21	-	4	43
VII	TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT					
	Administrator Kesehatan	10	13	-	3	26
	Penyuluh Kesehatan	3	-	-	-	3
VIII	TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN					
	Sanitarian	6	1	-	-	7
IX	TENAGA GIZI	12	6	-	-	18
X	TENAGA KETERAPIAN FISIK					
	Fisioterapis	3	1	-	-	4



XI	TENAGA KETEKNISIAN MEDIS					
	Perekam Medis dan Informasi Kesehatan	1	3	-	-	4
	Refraksionis optisien	1	-	-	-	1
	Penata Anestesi	-	2	-	-	2
	Terapis gigi dan mulut (perawat gigi)	11	-	-	-	11
XII	TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA					
	Radiografer	9	9	-	1	19
	Elektromedis	1	-	-	-	1
	Analisis Kesehatan (Pranata Laboratorium Kesehatan)	6	22	-	1	29
XIII	TENAGA NON KESEHATAN	116	21	2	184	323
	TOTAL	567	417	2	226	1,212

b) Tenaga Honorer

RSD Mangusada saat ini masih ada tenaga honorer dengan jumlah 226 dan sedang di rencanakan formasi PPPK yang akan di lakukan di Tahun 2024

c) Kekurangan atau kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan saat ini di RSD Mangusada

Masih ada kekurangan atau kebutuhan jumlah tenaga kesehatan dengan jumlah 124 nakes untuk pengembangan pelayanan KJSU - KIA dan sudah di ajukan formasi ke kemenkes yang di input dalam sistem SIASN

( sistem informasi aparatur negara)

## **5. Kendala yang dihadapi RSD Mangusada dalam Upaya memberikan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat**

**Ada beberapa faktor yang menjadi kendala yaitu sebagai berikut:**

### **1. Faktor SDM**

Belum optimalnya kebutuhan SDM di RSD Mangusada dalam melaksanakan pelayanan kesehatan seperti pelayanan Mata Onkologi, Obgyn Onkologi, Anak Onkologi dan Radioterapi

### **2. Faktor Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana yang belum memadai dan Masih kurangnya fasilitas kapasitas ruangan pelayanan rawat inap dan fasilitas kapasitas ruangan rawat jalan seperti pelayanan Radioterapi

### **3. Faktor Pembiayaan**

- a. Jenis tindakan yang sama di bayar berbeda untuk tipe rumah sakit, contoh tindakan sc tindakan sama tapi di bayar lebih rendah
- b. Ada beberapa tindakan yang tidak terklaim pada klaim BPJS seperti Varicocele, dan tidak juga tercover dalam pembiayaan jaminan kesehatan daerah
- c. Belum optimalnya layanan terpadu antara RS dengan Instansi lain seperti pengurusan Jasa Raharja dengan kepolisian dan BPJS.

### **4. Faktor Pemanfaatan Digital**

Sistem Reservasi online belum di gunakan secara optimal oleh masyarakat sehingga masih terjadi penumpukan antrian.

## **BIDANG KETENAGAKERJAAN**

### **A. DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BADUNG**

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung memiliki targert sebagaimana arah pembangunan serta program prioritas bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Badung Tahun 2023, dan 2024 melalui : (a) Mengoptimalkan pelatihan bagi wirausaha baru dengan meningkatkan

pembangunan SDM (b) Menekan Jumlah Pengangguran dengan mengoptimalkan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja, (c) Mengoptimalkan Penempatan Tenaga Kerja dengan meningkatkan kerjasama dengan sektor swasta (d) Meningkatkan teknologi informasi pasar kerja dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi pasar kerja berbasis online (e) Meningkatkan kualitas Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dengan Melaksanakan akreditasi terhadap program dan instruktur Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) ada di Kabupaten Badung, (f) Meningkatkan kompetensi pekerja sektor pariwisata dan sektor lainnya, (g) Meningkatkan Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja dengan optimalisasi perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, pembinaan hubungan industrial, dan aspek-aspek kesejahteraan pekerja, (h) Meningkatkan perlindungan hak-hak pekerja dengan meningkatkan jumlah perusahaan yang mengesahkan peraturan perusahaan.

Dalam rangka upaya pemerintah daerah dalam menghadapi hambatan dan tantangan bidang ketenagakerjaan khususnya penciptaan lapangan kerja produktif, dan dalam rangka menekan tingginya angka pengangguran dalam strategi pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Badung terutama dalam menghadapi bonus demografi 2030 yang akan datang adalah sebagai berikut:

- a. **Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM):** Mendukung pengembangan dan pertumbuhan industri kecil dan menengah di Kabupaten Badung dapat menjadi langkah penting dalam menciptakan lapangan kerja. Ini dapat dilakukan melalui pemberian pelatihan, akses ke pasar, dan dukungan keuangan.
- b. **Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja dan Pemberian Sertifikasi Kompetensi Pekerja Sektor Pariwisata:** Melalui program pelatihan dan pendidikan, Pemerintah Kabupaten Badung meningkatkan kualifikasi dan keterampilan tenaga kerja lokal sehingga sesuai dengan permintaan pasar kerja serta memberikan Sertifikasi Kompetensi Pekerja Sektor Pariwisata (dana APBD) kepada pekerja sektor pariwisata di Kabupaten Badung sebanyak 1.000 pekerja pada tahun 2023, dan 6.400 pekerja tahun 2024.

- c. **Kerja Sama dengan Sektor Swasta (LPKS, P3MI, dan Perusahaan):** Pemerintah Kabupaten Badung menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk menciptakan program-program kemitraan publik-swasta yang bertujuan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan produktivitas.
- d. **Pengembangan Sumber Daya Manusia:** Investasi dalam pendidikan dan pelatihan yakni berupa penyuluhan dan bimbingan jabatan kepada calon lulusan SMK dan pencari kerja, terutama untuk generasi muda yang akan memasuki pasar kerja dalam beberapa tahun ke depan, menjadi kunci dalam menghadapi bonus demografi yang akan datang.

Seluruh upaya ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Kabupaten Badung menghadapi tantangan dalam menciptakan lapangan kerja produktif dan menekan tingginya angka pengangguran, terutama dalam menghadapi bonus demografi yang akan datang pada tahun 2030.

Capaian pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Badung dan *Standar Sustainable Development Goals (SDGs)* diterapkan dalam upaya capaian pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Badung yang dilakukan adalah

- a. **Peningkatan Ketersediaan dan Akses Terhadap Pekerjaan Layak:** Salah satu tujuan utama SDGs adalah mengurangi kemiskinan dan menciptakan pekerjaan layak bagi semua orang. Dalam konteks Kabupaten Badung, langkah-langkah dapat diambil untuk meningkatkan ketersediaan pekerjaan di sektor-sektor yang berkelanjutan, seperti pariwisata berkelanjutan atau industri kreatif, sambil memastikan bahwa pekerjaan tersebut memberikan upah yang layak dan kondisi kerja yang aman.
- b. **Pemberdayaan Ekonomi Lokal:** SDGs juga menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi lokal dan inklusif. Pemerintah Kabupaten Badung mempromosikan pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) sebagai bagian dari strategi pembangunan ketenagakerjaan. Pada tahun 2025 melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung telah menyusun kegiatan pembentukan kelompok tenaga kerja mandiri

(TKM) guna pemberdayaan tenaga kerja lokal sesuai dengan karakteristik wilayah.

- c. **Peningkatan Akses Terhadap Pelatihan:** Salah satu target SDGs adalah memastikan akses universal terhadap pelatihan yang relevan untuk pekerjaan. Pemerintah Daerah Kabupaten Badung bekerja sama dengan lembaga pelatihan kerja untuk menyediakan program-program yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal, sehingga meningkatkan keterampilan dan kualifikasi tenaga kerja.

Dalam menghadapi kemajuan teknologi 4.0 serta kondisi pandemi covid-19 sejak tahun 2020, pemerintah menerbitkan kebijakan dalam rangka meningkatkan lapangan kerja dan kualitas SDM melalui UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No 34 tahun 2021. Kebijakan tersebut menjadi pintu gerbang masuknya investasi asing ke Indonesia dan mengatur mengenai penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam rangka perluasan lapangan kerja di Indonesia yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi iklim usaha di Indonesia. Berikut ini adalah data dan informasinya terkait hal-hal sebagai berikut:

Jumlah TKA dan perusahaan asing dan perusahaan dalam negeri beserta jumlah persentase pekerja lokal dibanding pekerja asing di Kabupaten Badung. Jumlah TKA di Kabupaten Badung adalah 1.651 orang, Jumlah perusahaan di Kabupaten Badung adalah 16.727 perusahaan, Jumlah tenaga kerja lokal di Kabupaten Badung adalah 172.763 orang, Persentase pekerja lokal dibanding pekerja asing di Kabupaten Badung dan Persentase pekerja lokal =  $172.763 / (1.651 + 172.763) \times 100\% = 99,05\%$ .

Jumlah dan kenaikan investasi (PMA dan PMDN) di Kabupaten Badung sejumlah Jumlah investasi PMA tahun 2022 = Rp 3.206.843.948.000,00. Jumlah investasi PMA tahun 2023 = Rp 6.587.247.864.590,23. Kenaikan investasi di kabupaten Badung =  $(6.587.247.864.590,23 - 3.206.843.948.000,00) / 6.587.247.864.590,23 \times 100\% = 51,32\%$ .

Persentase pertumbuhan TKA di Kabupaten Badung Persentase pertumbuhan TKA tahun 2023 =  $(1.651 - 1.480) / 1.651 \times 100\% = 10,38\%$ . Dalam

menggunakan TKA, pemerintah menetapkan kewajiban pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) Besarannya DKPTKA Kabupaten Badung tahun 2023 adalah Rp 12.861.987.994 (Dua Belas Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) dan DKPTKA tersebut dimanfaatkan untuk membiayai program dan kegiatan dibidang ketenagakerjaan antara lain : sertifikasi tenaga kerja, pelatihan bagi pencari kerja, dan pemberian subsidi BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan Pasal 29 ayat 1 menyebutkan bahwa pemberi kerja TKA wajib menunjuk tenaga kerja WNI sebagai tenaga pendamping TKA yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA kecuali untuk PMA yang TKAnya adalah direktur atau komisaris tidak menggunakan tenaga pendamping. Jumlah TKA tahun 2023 di Kabupaten Badung = 1.651 orang sementara Jumlah tenaga pendamping = 1.592 orang. Peta regulasi masuknya TKA berdasarkan PP No. 34 tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Permenaker No. 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.34 tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Perda Kabupaten Badung No. 10 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan.

Dalam rangka peningkatan skill pekerja lokal, persiapan pemerintah daerah memberikan pelatihan kepada calon pekerja sektor pariwisata melalui: (a) Pelatihan mekanik sepeda motor kepada 20 orang dengan anggaran Rp.190.000.000,- (b) Pelatihan pengenalan budaya dan bahasa Jepang kepada 40 orang dengan anggaran Rp. 100.000.000,- (c) Pelatihan spa therapist kepada 20 orang dengan anggaran Rp.150.000.000,- (d) Pelatihan tata rias kepada 20 orang dengan anggaran Rp. 160.000.000,- (e) Magang ke Jepang kepada 20 orang dengan anggaran Rp. 700.000.000,- (f) Pelatihan metodologi instruktur LPK kepada 45 orang dengan anggaran Rp.

157.500.000,- (f) Sertifikasi kompetensi kepada 6.400 pekerja sektor pariwisata dengan anggaran Rp. 3.840.000.000,-.

## B. BPJS KETENAGAKERJAAN

Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung memberikan subsidi iuran BPJS Ketenagakerjaan (JKM dan JKK) sebesar Rp. 16.800,- kepada pekerja informal yang masuk dalam DTKS, berKTP Badung, serta belum terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, sebanyak 35.000 pekerja pada tahun 2024.

### BPJS Ketenagakerjaan



Total telah terlindungi: 200,481 tenaga kerja  
Belum terlindungi:  
• Sektor Penerima Upah: 62,575  
• Sektor Bukan Penerima Upah: 125,372

Sumber Data :  
Sistem Informasi Perlindungan Pekerja (SMILE) BPJS  
Ketenagakerjaan

**SUMBER ANGGARAN APBD & APBDES**

No	Sektor	Jumlah Tenaga Kerja	Nominal Iuran
1	Non ASN	8.563	3,479,757,491
2	Peradatan (Sulinggih, Pemangku, Kelian Adat, Pekaseh, & Pangliman)	2.453	492,758,640
3	Perangkat Desa	1.646	9,569,597,121
<b>Total</b>		<b>12.662</b>	<b>13,542,113,252</b>

**SUMBER ANGGARAN TJSP  
PROGRAM KERJA BERSAMA  
BAGIAN ADMINSTRASI DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BADUNG**

Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah Iuran
362 Tenaga Kerja selama 3 Tahun	Rp 218.937.600

Sumber Data :  
Sistem Informasi Perlindungan Pekerja (SMILE) BPJS  
Ketenagakerjaan

Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah Iuran
Sumber Anggaran	APBD 2024 Sebanyak 35.000 pekerja rentan
Target dan kriteria	<ul style="list-style-type: none"> <li>warga di Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;</li> <li>terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS);</li> <li>tidak terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja sektor penerima upah;</li> <li>tidak terdaftar sebagai peserta JKK dan JKM yang sumber dananya di luar anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan</li> <li>pada saat mendaftar antara usia 17 tahun sampai dengan dibawah usia 65 tahun</li> <li>aktif melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan</li> </ul>



### **C. KUNJUNGAN LPK**

Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) merupakan salah satu bentuk lembaga pendidikan nonformal yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja. Dalam era globalisasi dan persaingan pasar yang semakin ketat, keberadaan LPK sangat penting dalam mempersiapkan tenaga kerja yang siap bersaing dalam pasar kerja. Namun, meskipun sudah banyak LPK yang berdiri di Indonesia, masih terdapat berbagai masalah dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan di LPK.

Rahayu Sedana Luwih merupakan salah satu LPK di Kabupaten Badung. LPK ini melayani pelatihan kerja, peningkatan skill kerja, pengenalan lingkungan kerja dan lainnya. LPK juga memberikan pelayanan berupa pelatihan bahasa asing, informasi lowongan kerja serta penyaluran tenaga kerja.

Rahayu Sedana Luwih sebagai bagian dari masyarakat menyadari pula tanggung jawab tersebut dengan berperan serta dalam menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan yang berasaskan Pancasila sebagai asas bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam negara Republik Indonesia yang dijiwai oleh Undang-undang Dasar 1945.

Peran serta itu diwujudkan dengan mengambil bagian dalam mendidik masyarakat Indonesia untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang tidak hanya profesional dalam bidang ilmunya, akan tetapi juga mandiri dalam sikap dan kepribadian, takwa kepada Tuhan, kasih kepada sesama, berjiwa Pancasila serta cinta kepada tanah air Indonesia.

Keputusan pendirian Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) didasarkan atas keputusan Yayasan tentang perlunya dilakukan pengembangan Lembaga Pendidikan dan Latihan. Pendirian ini bertujuan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Latihan dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan dan ketrampilan di bidang kepariwisataan dalam mendukung pembangunan masyarakat dan negara.

Melalui tujuan ini diharapkan dapat membantu menumbuhkan sikap kepribadian peduli lingkungan, peka dan kritis terhadap dampak negatif dunia kepariwisataan, berjiwa dan berbudaya Indonesia serta membentuk generasi

yang kreatif, agar dapat menciptakan pekerjaan di berbagai bidang khususnya di bidang kepariwisataan yang bernuansa kebangsaan dan tidak merusak nilai budaya bangsa.

### **Visi, Misi dan Tujuan**

Visi **Rahayu Sedana Luh** Pelatihan adalah menjadi Lembaga Pelatihan terdepan dalam mutu yang mampu menyelenggarakan Pelatihan dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan dan keterampilan Pelatihan di bidang Hotel dan Kapal Pesiar dalam mendukung pemberdayaan sumber daya manusia dan pembangunan masyarakat dan negara Indonesia.

Misi, untuk mempersiapkan tenaga-tenaga yang handal, terampil dan ahli, profesional, berkualitas dalam bidangnya diakui ditingkat nasional maupun internasional dalam menghadapi persaingan global serta menumbuhkan sikap kepribadian peduli lingkungan, peka dan kritis terhadap dampak negatif dunia kepariwisataan, berjiwa dan berbudaya Indonesia serta berbudi dan membentuk generasi yang kreatif, agar dapat menciptakan tenaga kerja yang bernuansa nasional dan berbudaya dan melanjutkan nilai budaya bangsa.

Tujuan, Sesuai dengan tujuan pendidikan berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 sebagaimana yang dinyatakan dalam GBHN yaitu meningkatkan kecerdasan bangsa, keterampilan, budi pekerti dan mempertebal semangat kebangsaan, cinta tanah air serta meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dalam melaksanakan pembangunan bangsa dan negara Indonesia serta membantu pemerintah dalam memenuhi harapan akan kebutuhan lembaga pendidikan yang bermutu khususnya dalam persaingan global dewasa ini.

## **Kurikulum**

Kurikulum Lembaga Pelatihan dirancang untuk membekali peserta latihan bukan hanya siap pakai dalam memasuki lapangan pekerjaan, tetapi juga untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yang berbasis kompetensi keilmuan.

Kurikulum yang diberikan kepada peserta latihan adalah Kurikulum Program Pelatihan Berbasis kompetensi yang mengacu kepada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peristiwa mengacu kepada SK Menteri Tenaga Kerja No. 69/Men/III/V/2004 tentang perubahan Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep. 227/Men/2003 Tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja; SKKNI).

Program Basic Level (Satu Tahun)

Food and Beverage Service (FBS)

Bidang Studi FBS memiliki tujuan umum menghasilkan tenaga pelaksana yang berkepribadian berpengetahuan dan terampil dalam melaksanakan tugas pelayanan hidangan makanan dan minuman, serta mampu melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin di pelayanan hidangan dan minuman. Dengan jumlah target peserta didik setiap kelas sebanyak 20 orang. Dan selama praktek dan kegiatan kelompok, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang jumlah anggotanya tidak lebih dari 5 orang untuk setiap pengawas latihan dan instruktur.

Food and Beverage Product (FBP)

Bidang studi FBP memiliki tujuan umum program menghasilkan tenaga pelaksanaan yang berkepribadian dan terampil dalam melaksanakan tugas pelayanan jasa boga, serta mampu melaksanakan pekerjaan yang bersifat profesional. Dengan jumlah target peserta didik setiap kelas sebanyak 20 orang. Dan selama praktek dan kegiatan kelompok, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang jumlah anggotanya tidak lebih dari 5 orang untuk setiap pengawas latihan dan instruktur.

Room Division

Bidang studi Room Division memiliki tujuan umum program menghasilkan tenaga pelaksana yang berkepribadian dan terampil dalam melaksanakan tugas pelayanan room division, serta mampu melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin di jasa room atau kamar

#### **IV. REKOMENDASI**

1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk terus melakukan koordinasi dan memperhatikan ketersediaan tenaga Kesehatan khususnya dokter spesialis.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk terus melakukan koordinasi secara aktif dan memberikan perhatian khusus kepada Pemerintah Kabupaten Badung terkait dengan Balai Latihan Kerja maupun Balai Latihan Kerja.
3. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan RI untuk terus melakukan terobosan dalam rangka meningkatkan kepesertaan BfPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Badung.

#### **V. PENUTUP**

Demikian laporan Komisi IX DPR RI dalam rangka kunjungan kerja reses ke Pemerintah Kabupaten Badung ini kami sampaikan. Atas perhatian dan jawaban dari Pemerintah Kabupaten dan dukungan dari semua pihak, kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, Mei 2024

**TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR RI  
KE KABUPATEN BADUNG  
KETUA TIM,**

**ttd.**